BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pada era globalisasi seperti ini kemajuan ilmu pengetahuan ekonomi sangat kompleks, hal tersebut seiring dengan berkembangnya teknologi informasi sehingga akan membuka wawasan mengenai paradigma kehidupan dimasa yang akan datang terutama di bidang ekonomi akuntansi. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang berkembang melebihi yang di bayangkan. Sumbangan besarpun diberikan ilmu pengetahuan bagi perkembangan ekonomi dewasa ini tak tekecuali Indonesia. Akuntansi merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang memberikan sebuah system dan informasi pelaporan yang baik, benar, dan memadai bagi perusahaan atau pun instansi.

Sistem informasi merupakan salah satu penunjang perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu informasi yang vital bagi prusahaan adalah informasi keuangan, karena sangat berpengaruh terhadap efesiensi dan distribusi penggunaan sumber-sumber ekonomi perusahaan, dan yang terpenting dari informasi keuangan adalah mengenai kas.

Kas merupakan harta lancar yang dimiliki perusahaan yang dimilliki perusahaan yang bias mengukur likuiditas perusahaandalam memenuhi beban-beban biaya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan memenuhi kewajiban lancer jangka pendek perusahaan. Oleh karena itu proses pencatatan

transaksi kas dari bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (*General Accepted Accounting principle*) seperti memperhatikan prinsip konsistensi, prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan informasi keuangan yang lelevan, dapat dimengerti dan dan dapat diverifikasi.

Laporan Arus Kas di dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 disebut Laporan Aliran Kas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk/keluar kas ke/dari pemerintah daerah berikut saldo kas selama satu suatu peride tertentu. Dengan demikian dalam Laporan Arus kas ini tidak hanya disajikan keluar masuknya uang kdari/ke kas daerah tetapi juga mencakup kas yang sudah diterima oleh para bendahara penerimaan.

SAP mengelompokkan Arus Kas menjadi empat, yaitu arus kas dari:

1. Aktivitas Operasi;
2. Aktivitas Investasi Nonkeuangan;
3. Aktivitas Pembiayaan; dan
4. Aktivitas Non-anggaran.

Perbedaan yang terjadi dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 adalah pada aktivitas non-anggaran, yaitu yang digunakan untuk menyajikan arus masuk/keluar uang ke/dari kas daerah tetapi bukan hak pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga arus kas ini sering disebut arus kas transito.

SAP dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sama-sama mengatur pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Pada dasarnya bagian ini menyajikan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi pemerintah daerah. Dengan demikian yang disajikan adalah pendapatan operasi dan belanja operasi.

Pendapatan operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Secara garis besar ketentuan di SAP dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sama. Namun demikian apabila diteliti isi dari setiap sumber pendapatan terdapat pendapatan-pendapatan tertentu yang tidak masuk dalam kelompok pendapatan operasi.

Pendapatan yang perlu direklasifikasi adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan aset tetap, baik yang berasal dari penjualan tunai maupun penjualan angsuran, merupakan arus kas masuk yang berasal dari aktivitas investasi nonkeuangan.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Sesuai dengan klasifikasi biaya dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 maka arus keluar kas untuk aktivitas operasi juga diklasifikasikan ke dalam Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka.

Sejalan dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran maka arus kas untuk keperluan aktivitas operasi ini juga direklasifikasi ke dalam klasifikasi belanja berdasarkan SAP dengan pola sebagaimana diuraikan dalam klasifikasi belanja terdahulu.

Dalam rangka manajemen kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan penanaman terhadap saldo kas yang menganggur untuk sementara waktu dalam

bentuk investasi jangka pendek, seperti deposito yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan pembelian Surat Utang Negara. Berhubung keluar masuknya uang ini terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah maka arus kas ini juga disajikan dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi. Sebagai contoh terdapat pengeluaran uang dari rekening Kas Umum Daerah yang ditanamkan dalam Deposito berjangka 6 bulan sebesar Rp 10 milyar. Pengaluaran ini disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas operasi. Sebaliknya, misalnya terdapat pencairan deposito berjangka 6 bulan sebesar Rp 5 milyar, maka pencairan ini disajikan dalam arus masuk kas dari aktvitas operasi.

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 mengatur bahwa arus kas untuk perolehan/penjualan aset tetap maupun penyertaan modal dimasukkan dalam aktivitas investasi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka arus kas dari aktivitas investasi berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 perlu direklasifikasi. Arus kas yang berasal dari penyertaan modal pemda dikeluarkan dari aktivitas investasi dan dipindahkan ke aktivitas pembiayaan.

Disamping itu juga perlu diingat, sebagaimana diuraikan pada arus kas dari aktivitas operasi bahwa penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan aset tetap dimasukkan dalam arus kas dari aktivitas investasi.

Selanjutnya dalam rangka menjaga kontrol hubungan antar akun, rincian arus masuk dan arus keluar kas dalam aktivitas investasi disajikan sesuai dengan urutan penyajian aset tetap di neraca. Oleh karena itu penyajian arus kas ini perlu dirinci ke dalam arus masuk/arus keluar untuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap Lainnya

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Dengan memperhatikan pengertian pembiayaan tersebut maka tampak bahwa terdapat arus masuk kas dan arus keluar kas dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang belum sesuai dengan SAP, yaitu:

1. Penerimaan pajak tahun lalu
2. Pembayaran utang pajak/biaya tahun lalu

Jika penerimaan dari piutang pajak atau pembayaran utang tersebut terjadi karena sistem penerimaan yang diatur pemerintah, merupakan transaksi yang normal terjadi, dan bersifat berulang maka disajikan sebagai pendapatan pada tahun terjadinya penerimaan. Dengan demikian dimasukkan dalam kelompok aktivitas operasi. Sebagai contoh: Pendapatan pajak hotel yang berasal dari penetapan tahun berjalan Rp 10 juta, penerimaan piutang pajak hotel tahun lalu Rp 1 juta, maka kedua jumlah tersebut disajikan dalam Pendapatan Pajak Daerah di kelompok Aktivitas Operasi.

Pembayaran biaya tahun lalu juga merupakan arus kas aktivitas operasi, sepanjang untuk pembayaran belanja operasi. Jika pengeluaran tersebut untuk pembayaran belanja modal maka pengeluaran tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok arus kas dari aktivitas investasi. Perlakuan demikian dilakukan jika

substansi transaksi yang menimbulkan utang belanja tersebut bukan karena untuk menutup defisit anggaran.

Pembayaran utang pajak tahun lalu dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dapat diasumsikan sebagai pembayaran utang atas pungutan PPh/PPN/lainnya, yang di lingkungan pemerintah disebut sebagai uang perhitungan pihak ketiga (PFK), yang telah dilakukan oleh Pemda tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara. Pungutan dan penyetoran uang PFK ini bukan sebagai aktivitas pembiayaan tetapi aktivitas nonanggaran karena tidak menambah atau mengurangi APBD. Oleh karena itu apabila Pemda telanjur mengelompokkan penerimaan dan pungutan PFK ini dalam aktivitas pembiayaan perlu melakukan reklasifikasi, memindahkannya ke aktivitas nonanggaran.

Dewasa ini perkembangan dunia begitu cepat baik itu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dll. Oleh karena itu pemerintah beserta elemen-element dibawahnya termasuk masyarakat ikut andil dalam pemeliharaan dan perkembangan di bumi pertiwi ini. Penyelenggaraan pemerintahan di ajukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan negara, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik keuangan pusat dan keuangan daerah.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945, keuangan daerah yang di dalamnya termasuk keungan daerah merupakan hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termsuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan degan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daaerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memberikan infomasi keuangan secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders* agar terhindar dari kebiasaan karena kesalahan atas pengelolaan keuangan daerah, baik itu berupa kesalahan dalam pencatatan maupun penyelewengan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatsetampat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daaerah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tantanga pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperkuat pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan Negara. Wjud dari salah satu perubahan itu di tandai dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang didalamnya menjelaskan

konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan traspransi pengelolaan keuangan daerah.

Konsep otonomi daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengeloalaan keuangan daerah lebih jauh dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban kepala Daerah, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Ssrem Informasi Keuangan Daerah. Dari ketiga PP tersebut peada pokoknya pengelolaan keuangan daerah harus dapat di pertanggungjawabkan akuntabilitasnya sbagai salah satu konsep wujud dari suatu otonomi daerah.

Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah tersebut salah satu cara yang di tempuh adalah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Dengan pelaksanaan tersebut maka public dapat mengetahui kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah serta akuntabilitasnya.

Agar akuntabilias sektor publik terjamin diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, adil, efektif, dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah, menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Daerah (SKAD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi yang selama ini di terapkan di Pemerintahan Daerah.

Dengan sistem akuntansi daerah, diharapkan akuntabilitas yang di terapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapi dan setiap pemerintah provonsi

/kota/kabupeten memiliki kemampuan menyusun laporan keuangan daerah yang mencangkup antara lain :

1. Laporan perhitungan APBD
2. Nota perhitungan APBD
3. Laporan Aliran Kas
4. Neraca Daerah

Salah satu untuk mewujudkan *good govermance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segal informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dangan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat di ikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan dimana kita bias melihat segala yang terjadi dan terdapat d dalamruang entitas itu, yaitu entitas pemerintahan. Melalui laporan keuangan Pemerintah, informasi yang di butuhkan berbagai pihak seperti rakyat, pemegang saham, penanam modal, dan kreditur untuk pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif.

Otonomi daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat dengan program desentralisasi. Kebijakan tersebut menuntut pengendalian yang lebih kuat dalam artian perumusan perangkat peraturan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat secara umum. Proses penyusunan anggaran tidak lagi diatur oleh pusat, melaikan pada keharmonisan hubungan eksekutif (pemda) dengan legislatif (DPRD) penyusunan anggaran juga melibatkan masyarakat.

Beberapa bentuk peraturan tersebut berupa penerapan peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tatacara pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD, ketentuan tersebut pada intinya mengetengahkan agar pemerintah daerah segera menerapkan sistem akuntansi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah provinsi jawa barat merupakan salah satu entitas pelaporan yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki entitas akuntansi, salah satunya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya dikenal sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai laporan keuangan arus kas, oleh karena itu laporan ini berjudul **“ PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ARUS KAS”.**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Dengan melakuakan kerja praktek ini, penulis mengetahui bagaimana aktivitas kerja sesungguhnya pada suatu instansi pemerintah, terutama pada aktivitas pencatatan bukti transaksi dan dapat mengimplementasikan materi-

materi perkuliahan pada dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga penulis dapat lebih memahami hal-hal teknis aktivitas tersebut.

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dengan melakukannya kerja praktek ini,penulis ingin mengetahui pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Arus kas.

1.1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan kerja praktek di bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diantaranya :

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan dan peneluaran kas pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan arus kas pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan laporan keuangan arus kas pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penulis, instansi Pemerintahan yang diteliti, juga bagi program studi akuntansi dan tentunya untuk Fakultas Ekonomi di Universitas Komputer Indonesia dan masyarakat pada umumnya yaitu sebagai berikut:

1. Penulis

   Kerja praktek di bagian pelaporan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat berguna untuk dapat lebih memahami materi-materi yang di ajarkan di bangku perkuliahan khususnya tentang pelaksanaan penyusunan laporan keuangan arus kas.

2. Instansi Pemerintahan

   Manfaat yang diperoleh Bagian Akuntasi Pelaporan Pemerintah Jawa Barat dengan adanya mahasiswa yang melakukan kerja praktek disana, diantaranya :

   1. Membantu meringankan beban pekerjaan para karyawan seperti pengarsipan data-data karena sedikitnya dapat membantu meringankan pekerjaan mereka.
   2. Membantu pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan seperti SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana), STS(Surat Tanda Setoran).

3. Universitas Komputer Indonesia

   Kegunaan diadakannya program Kerja Praktek ini terutama di Prodi Akuntansi adalah sebagai alat evaluasi terhadap relevansi kurikulum pengajaran dan dapat mengkatkan kepercayaan perusahaan terhadap mutu dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi atau universitas yang bersangkutan.

   Kuliah kerja praktek bermanfaat pula bagi Fakultas Ekonomi sebagai bahan evaluasi materi-materi akuntansi pemerintahan khususnya pada penyusunan laporan keuangan arus kas.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *Block Release*, yaitu dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas dengan terjun langsung pada objek kegiatan yang diteliti dengan mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan dari sebuah Instansi.

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

   Riset lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan dibahas oleh penulis,serta ikut turun langsung dalam pengerjaan pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah pada bagian akuntansi dan pelaporan yang dikhususkan pada pelaporan keuangan arus kas

   b. Wawancara (*Interview*)

      Penulis melakukan tanya jawab dengan Kepala Bagian Akuntansi Pelaporan yang bertanggung jawab di instansi tersebut yang dilakukan

secara tidak terstruktur. Penulis langsung menanyakan apa yang akan dijadikannya sebagai bahan penulisan pada laporannya,

c. Dokumentasi (*Document*)

Bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan penulis untuk djadikan bahan dalam pembuatan laporan kerja praktek, seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dan lampiran-lampiran laporan arus kas pada periode 2008-2009.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku,diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan dan kerja praktek. Didalam penelitian kepustakaan ini penulis meneliti dari berbagai sumber yaitu :Akuntansi Sektor Publik, Metodelogi Penelitian, Layanan Internet serta catatan yang pernah di dapat selama perkuliahan berlangsung.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan arus kas ini saya selaku penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke perusahaan yang akan dijadikan sebagai tujuan untuk melaksanakan Kerja Praktek ini. Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan Kerja praktek yang tertera dibawah ini :

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi kuliah kerja praktek dilakukan di SETDA PEMPROV JABAR (Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Bagian Akuntansi Pelaporan Bandung Jl. Diponegoro no.22 Bandung 40115,Telp (022) 4232448 – 4233347 – 423096. Adapun aktivitas yang dilakukan selama terjadinya kuliah kerja praktek di Pemprov Jabar dan persiapan serta pelaksanaan penulis dalam melakukan kerja praktek ini.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek dan aktivitas kantor di Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada bagian Akuntansi Pelaporan,serta tabel jadwal pelaksanaan kerja praktek yaitu :

Tabel 1.1
Aktivitas Kerja Praktek dan Aktivitas di Kantor

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jum'at	07:30 s/d 16:00 WIB
2	Istirahat	Senin s/d Kamis	12:00 s/d 13:00 WIB
		Jum'at	11:30 s/d 13:00 WIB
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO		KEGIATAN Kerja Praktek	BULAN & TAHUN						
			JUNI '10	JULI '10	AGT '10	SEPT '10	OKT '10	NOV '10	DES '10
I	**Persiapan Kerja Praktek**								
	1	Permohonan Ijin Kerja Praktek							
	2	Realisasi Ijin Kerja Praktek							
	3	Menentukan Tempat Kerja Praktek							
	4	Mendapat surat penerimaan							
	5	Mendapat Absen							
II	**Pelaksanaan**								
	1	Aktivitas Kerja Praktek							
	2	Bimbingan di tempat Kerja Praktek							
III	**Pelaporan Kerja Praktek**								
	1	Konsultasi							
	2	Mulai Bimbingan							
	3	Pembuatan Laporan							
	4	Ujian Kerja Praktek							
	5	Selesai Pelaporan							